

TESIS

**PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DALAM PENGEMBANGAN WISATA DI KECAMATAN BARAKA
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh

M. ASWAD HASTA

P022201007



**PROGRAM STUDI PERENCANA DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH / OTONOMI DAERAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

**PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM
PENGEMBANGAN WISATA DI KECAMATAN BARAKA KABUPATEN
ENREKANG**

*THE YOUTH SPORTS AND TOURISM OFFICE'S FUNCTION IN BARAKA
DISTRICT, ENREKANG REGENCY'S TOURISM DEVELOPMENT*

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Otonomi Daerah

Disusun dan Diajukan Oleh

M. ASWAD HASTA

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DALAM PENGEMBANGAN WISATA DI KECAMATAN
BARAKA KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh

M. ASWAD HASTA

P022201007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 5 September 2022
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



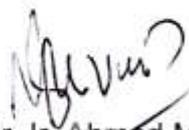
Prof. Dr. Andi Niartiningasih, MP.
Nip.196112011987032002



Dr. Andi Muhammad Rusli, M. Si.
Nip.196407271991031001

Ketua Program Studi.
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng.
Nip.196207271989031003



Prof. Dr. Budu, Ph.D. SP.M(K). M.Med Ed.
Nip.195612311995031009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Aswad Hasta

Nomor Mahasiswa : P022201007

Program studi : Perencana & Pengembangan Wilayah

Jenjang : Magister (S2)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 2 Oktober 2021

Yang menyatakan



M. Aswad Hasta

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa dengan selesainya tesis ini, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Tesis ini berjudul “Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” untuk memenuhi sebagian persyaratan guna penyelesaian studi pada Program Magister (S2) Konsentrasi Otonomi Daerah Program Studi Perencana & Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin.

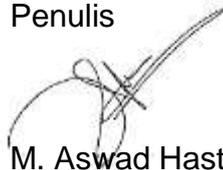
Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang hanya berkat bantuan dari berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dwia Aries Palubuhu, M.A, sebagai Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh studi pada Perguruan Tinggi yang dipimpinnya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng, sebagai Ketua Program Studi Perencana & Pengembangan Wilayah yang telah membantu Penulis dalam menempuh perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Niartiningih, MP. sebagai Pembimbing I serta Bapak Dr. Andi Muhammad Rusli, M. Si sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan motivasi yang tiada henti-hentinya kepada Penulis dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

4. Kepada Kepala Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang.
5. Kepada kedua orang tua terutama Bapak saya yang telah memberikan motivasinya untuk menyelesaikan Tesis ini

Makassar, 2 Oktober 2021

Penulis



M. Aswad Hasta

ABSTRAK

M. Aswad Hasta. Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dalam pengembangan wisata di Kecamatan Baraka. (dibimbing oleh **Andi Niartiningih** dan **Andi Muhammad Rusli**)

Kecamatan Baraka merupakan Kecamatan yang diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata alam Kabupaten Enrekang. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Kecamatan Baraka sebagai kawasan wisata yakni pengelolaan potensi wisata yang belum baik dan maksimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dalam pengembangan wisata di Kecamatan Baraka.

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dan Kecamatan Baraka yang dilakukan selama 3 bulan. Alat analisis rumusan masalah pertama peneliti menggunakan 3 tahapan, yaitu: reduksi data, display data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan. Alat analisis yang kedua peneliti menggunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang ada 5 yaitu motivator, komunikator, fasilitator, mediator dan dinamisator. Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang melalui analisis SWOT dengan tingkatan skor pembobotan 0-100 sangat kurang, 100-200 kurang, 200-300 cukup, 300-400 baik, 400-500 sangat baik menunjukkan bahwa dalam aspek Strength, Kecamatan Baraka memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan dengan besaran Skor Pembobotan 330. Aspek Weakness dengan tingkatan skor pembobotan kurang dari 300 yaitu kegiatan pembangunan desa wisata yang dilakukan pemerintah sangat lamban dengan skor pembobotan 260. Aspek Opportunitiess untuk mengembangkan potensi wisata cukup besar dengan skor pembobotan 330. Dan Threats dengan besaran skor pembobotan 270

Kata Kunci: pengembangan, peran, strategi, analisis SWOT, pariwisata

ABSTRACT

M. Aswad Hasta. *The Youth Sports And Tourism Office's Function In Baraka District, Enrekang Regency's Tourism Development.* (guided by **Andi Niartiningih** and **Andi Muhammad Rusli**)

Enrekang Regency's Baraka District is a sub-district classified as a natural tourism destination. The issue confronting the development of the Baraka District as a tourist destination is the inadequate management of tourism potential. As a result, the purpose of this research is to examine the role of the Enrekang Regency Youth and Sports Office in the development of tourism in the Baraka District.

This research was conducted for three months at the Department of Youth, Sports, and Tourism in Enrekang Regency and Baraka District. Researchers' initial issue formulation analysis tool included three stages: data reduction, data presentation, data verification, and generating conclusions. SWOT analysis is the second analytical tool utilized by academics.

According to the findings, the Youth, Sports, and Tourist Office played five roles in tourism development in Baraka District, Enrekang Regency: motivators, communicators, facilitators, mediators, and dynamists. The Youth, Sports, and Tourism Office's strategy in Tourism Development in Baraka District, Enrekang Regency through a SWOT analysis with a weighting score of 0-100 very poor, 100-200 less, 200-300 enough, 300-400 good, 400-500 very good indicating that in the Strength aspect, Baraka District has tourism potential that can be developed with a weighting score of 330. With a weighted score of 260, the government's tourism village development initiatives are a weakness with a weighting value of less than 300. Opportunities aspects to develop tourism potential are quite large by a weighting score of 330. And Threats with a weighted score of 270.

Keywords: *development, role, strategy, SWOT analysis, tourist*

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan tentang Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.....	11
C. Tinjauan tentang Pengembangan Pariwisata.....	22
D. Tinjauan tentang Pengembangan Desa Wisata	36
E. Kerangka Berpikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Hasil Penelitian	70
C. Pembahasan Penelitian	94

BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	1058

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Matriks SWOT	54
Tabel 4.1 Penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, tahun 2021 ..	57
Tabel 4.2 Desa/Kelurahan di Kecamatan di Kabupaten Enrekang, tahun 2021	59
Tabel 4.3 Penggunaan Lahan di Kecamatan Baraka Tahun 2021	61
Tabel 4.4 Alokasi Anggaran Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang 2021	74
Tabel 4.5 Faktor Strategis Internal Kekuatan (<i>Strenghts</i>) Pengembangan wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	82
Tabel 4.6 Faktor Strategis Internal Kelemahan (<i>weakness</i>) Pengembangan wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	83
Tabel 4.7 Faktor Strategis Eksternal Peluang (<i>opportunities</i>) Pengembangan wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	84
Tabel 4.8 Faktor Strategis Eksternal Ancaman (<i>Threats</i>) Pengembangan wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	84
Tabel 4.9 Matriks SWOT	87
Tabel 4.10 Jumlah Objek Wisata di Kecamatan Baraka 2015-2021 ...	92
Tabel 4.11 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kecamatan Baraka 2015-2021	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	47
Gambar 4.1 Desa Wisata Bonebone	62
Gambar 4.2 Gua Wai' Lambun Desa Wisata Kadingeh	63
Gambar 4.3 Beras Ketan Mandoti Desa Wisata Salukanan	64
Gambar 4.4 Grafik Analisis SWOT	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dang lobal. Pembangunan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggal yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah (Gunn.2002). Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian yang perlu diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dengan baik. Salah

satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata.

Desa Wisata merupakan salah satu program pemerintah, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2009. PNPM Mandiri Desa Wisata bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat desa wisata, masyarakat di sekitar daya tarik wisata, dan masyarakat di sekitar usaha pariwisata. Wisata pedesaan yang dikemas sebagai bentuk desa wisata dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak semua kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di desa adalah benar-benar bersifat desa wisata, oleh karena itu agar dapat menjadi pusat perhatian pengunjung, menurut Sastrayuda, Gumelar S. (2010:34), desa wisata harus memiliki komponen atau syarat-syarat, seperti: keunikan, keaslian, sifat khas, letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa.

Salah satu Kabupaten yang menerapkan desa wisata di dalam pengembanaan kepariwisataan yaitu Kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang merupakan kabupaten yang kaya akan sumber daya alam tetapi belum dikelola sebaik mungkin sehingga masih ketinggalan dengan daerah lain sehingga potensi yang ada perlu digali dan ditumbuhkembangkan. Agar potensi tersebut dapat terwujud maka perlu

pengolaan di segala bidang, begitupun juga dengan bidang kepariwisataan telah membuat suatu arah kebijakan bagi pengembangan pariwisata agar pengembangan di masa yang akan datang dapat terwujud sesuai arahan kebijakan untuk itu potensi yang ada perlu dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menunjang pembangunan daerah.

Pengembangan kawasan Desa Wisata di Kabupaten Enrekang dalam RTRW Kabupaten Enrekang diarahkan di Kecamatan Baraka yang juga merupakan bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut pandang sosial budaya di Kabupaten Enrekang. Selain itu Kecamatan Baraka merupakan Kecamatan yang diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata alam Kabupaten Enrekang.

Penentuan Kecamatan Baraka sebagai daerah wisata Kabupaten Enrekang tentu memiliki alasan yang sangat kuat karena semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ke Kecamatan Baraka di Kabupaten Enrekang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang mana dari pendapatan tersebut nantinya digunakan pula untuk mendukung pembangunan di sektor-sektor yang lain, karena kegiatan pariwisata tidak lepas kaitannya dengan sektor-sektor lain, selain itu juga untuk kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan syarat-syarat pengembangan kawasan wisata, maka Kecamatan Baraka telah memiliki syarat-syarat tersebut. Dari beberapa syarat yang harus dimiliki, maka syarat yang paling prinsip atau mendasar yaitu adanya potensi wisata (keunikan, keaslian, dan sifat

khas). Potensi wisata yang dimiliki tentunya wajib memiliki daya tarik agar dapat menarik wisatawan datang berkunjung. Syarat daya tarik yaitu ada sesuatu yang dapat dilihat, dapat dilakukan, dapat dibeli, dan dapat memberi pengetahuan.

Potensi wisata yang dimiliki yang merupakan penunjang bagi Kecamatan Baraka menjadi kawasan wisata yaitu antara lain; wisata alam seperti keindahan alam pegunungan yang masih asli mengingat Kecamatan Baraka berada di sekitar kaki Gunung Latimojong, kondisi iklim yang dingin dan sejuk, dan hasil-hasil pertanian atau perkebunan. Salah satu hasil perkebunan yang sangat terkenal dimiliki oleh Kecamatan Baraka yaitu aroma dan cita rasa komoditas kopinya, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kelompok Tani Putra Korok yang berasal dari Kecamatan Baraka tepatnya dari Desa Bonebone menjadi juara 1 Kontes Kopi Specialty Indonesia 2008, di Jember, Jawa Timur. Wisata budaya yang dimiliki Kecamatan Baraka yaitu budaya gotong royong masyarakat yang masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kerja bakti rutin yang dilaksanakan setiap hari sabtu secara rutin, wisata buatan yang merupakan pertimbangan utama pemerintah Kabupaten Enrekang menjadikan Kecamatan Baraka sebagai objek wisata karena keunikannya. Salah satu desa yang memiliki keunikan yang dimiliki oleh Kecamatan Baraka yaitu Desa Bone bone dimana didesa ini ada larangan merokok di wilayah desa (*No Smoking Village/ Kawasan Bebas Rokok*). Desa Bonebone merupakan desa pertama di dunia yang membuat larangan

merokok), sehingga desa ini menjadi terkenal baik lokal maupun internasional dan dijadikan sebagai desa percontohan. Selain itu, pemerintah desa juga membuat larangan mengonsumsi makanan yang memiliki zat pewarna dan mengonsumsi ayam ras. Ada juga keunikan lain yaitu kawasan Desa Salukanan penghasil beras ketan (Pulu') Mandoti yang dinobatkan sebagai beras ketan termahal dan harum di dunia yang hanya bisa ditanam di kawasan Desa Salukanan itu. Keunikan terakhir yang ada di Kecamatan Baraka adalah Gua Wai' Lambun yang berada di Desa Kadingeh, dimana konon katanya menurut warga desa gua tersebut memiliki luas yang sangat luar biasa yang bisa menampung seluruh masyarakat Kabupaten Enrekang dan menurut peneliti asal luar negeri, hanya ada dua di dunia jenis gua seperti ini, yang satu terletak di Jepang.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa potensi wisata harus memiliki daya tarik wisatawan, maka sudah jelas bahwa syarat-syarat daya tarik wisatawan telah dimiliki oleh Kecamatan Baraka antara lain; keindahan alam dan kebudayaan setempat merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati pengunjung, Wisata mendaki gunung, olahraga bersepeda, dan pekerjaan bertani (menanam, merawat, dan memetik hasil pertanian atau perkebunan) merupakan sesuatu yang dapat dilakukan wisatawan, hasil-hasil pertanian/perkebunan merupakan oleh-oleh yang dapat dibeli oleh wisatawan, serta pengetahuan tentang cara pemerintah sehingga masyarakat dapat menaati aturan dan pengetahuan berkebun

kopi yang baik merupakan pengetahuan yang bias didapatkan wisatawan di Kecamatan Baraka.

Ditinjau dari aspek aksesibilitas, keberadaan Kecamatan Baraka berjarak kurang lebih 54 Km dari Ibu Kota Kabupaten Enrekang. Dengan demikian walaupun memiliki jarak yang cukup jauh dari Kota Kabupaten namun Kecamatan Baraka tetap mudah dijangkau. Hal ini dikarenakan jalan yang menghubungkan Kecamatan Baraka dengan Ibu Kota Kabupaten Enrekang memiliki kondisi yang baik berupa jalan aspal dan jalan beton. Selain itu selama sepanjang perjalanan wisatawan akan disuguhkan keindahan pemandangan alam Kabupaten Enrekang yang berupa bentangan pegunungan, cuaca yang sangat sejuk, perkebunan penduduk dan permukiman tradisional masyarakat setempat. Melihat dari potensi wisata yang sudah ada maka Kecamatan Baraka memang sudah layak untuk menjadi kawasan wisata di Kabupaten Enrekang.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Kecamatan Baraka sebagai kawasan wisata yakni pengelolaan potensi wisata yang belum baik dan maksimal hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengelolanya, ada beberapa masyarakat yang mulai melanggar aturan wisata, sarana dan prasarana wisata yang belum memadai, kurangnya promosi wisata yang dilakukan masyarakat dan pemerintah, serta pengelolaan atau pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang sangat lamban. Sehingga menyebabkan Kecamatan Baraka belum mampu menarik banyak

wisatawan untuk berkunjung. Hal tersebut berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti.

Pada struktur pemerintah Kabupaten Enrekang terdapat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang merupakan unsure pelaksana tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang telah mengadakan pelatihan kepariwisataan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan wisata di Kecamatan Baraka, namun tidak ada tindak lanjut dari alumni peserta pelatihan tersebut, dan kemudian terjadi kevakuman dalam tindakan-tindakan kepariwisataan. Kewajiban Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dan partisipasi dari Masyarakat Kecamatan Baraka sadar Wisata menjadi penting dalam upaya pengembangan objek wisata di Kecamatan Baraka.

Berbagai upaya harus dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang sebagai pihak pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam bidang pariwisata mengingat program atau kegiatan dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang adalah program yang mengacu pada perkembangan pariwisata khususnya objek wisata sehingga Kabupaten Enrekang menjadi

Kabupaten yang menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) tidak lagi menjadi Daerah Antar Tujuan Wisata (DATW). Hal tersebut menjadi kewajiban instansi pemerintah bidang pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka pencapaian tata kelola pengembangan kepariwisataan yang baik.

Dari paparan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

2. Untuk mengetahui strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah kajian rangka pengembangan daerah wisata serta dapat digunakan sebagai referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

Hasil penelitian Fatmawati, (2020). di Permandian Alam Lewaja menemukan bahwa diperlukan sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitas pengembangannya. Proses pengembangan yang diperlukan adalah dengan melakukan pelatihan dan pendidikan dan juga membangun mitra dengan menghadirkan pemateri yang memiliki kapasitas pengetahuan tentang kepariwisataan. Wahana yang disediakan saat ini adalah kolam renang dan air terjun permandian alam lewaja hanya saja perlu memperhatikan kualitas air dan menjaga kebersihan fasilitas serta perlunya penambahan wahana. Secara regulasi penerapan tidak begitu mengikat pengunjung dan bersifat fleksibel tetap harus memperhatikan keselamatan pengunjung.

Hasil penelitian Fitriani, Amalia. (2019). menunjukkan bahwa peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam pembangunan Desa Wisata melalui pemberdayaan masyarakat Desa

Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Pariwisata secara signifikansi telah mampu menjalankan perannya secara maksimal. Hal tersebut dapat terwujud karena Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata telah mampu memonitoring segala kegiatan yang dilakukan di Desa Wisata Talun agar sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Peraturan.

Hasil penelitian Abdur Rohim, (2013). menemukan bahwa Pemberdayaan masyarakat Di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul dilakukan melalui pengembangan Desa Wisata Bejiharjo dengan menerapkan berbagai bidang seperti atraksi, akomodasi dan penyediaan SDM. Desa wisata berasal dari gagasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, yang kemudian mendapat respon positif dari para penggerak masyarakat lokal.

B. Tinjauan tentang Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

1. Pengertian Peran

Istilah peran yang biasa digunakan dalam dunia teater sebagai karakteristik seorang aktor, dalam disiplin ilmu sosial memiliki arti sebagai seseorang yang menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Suhardono, (2014:65). Peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang menempati posisi tertentu dalam kelompok. (Sarwono, 2015:87).

Sementara itu peran atau *roles* menurut Wibowo (2016:54) dimaksudkan sebagai serangkaian pola perilaku yang diharapkan dapat dihubungkan pada seseorang yang menguasai posisi tertentu dalam unit sosial.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2012:76). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Dalam hal ini status merupakan suatu peringkat atau posisi seorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap seseorang pasti mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah hak dan kewajiban: peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. (Horton, 2012:76).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-

hak dan kewajiban–kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Kesimpulannya bahwa hakekat peran adalah sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

2. Aspek-aspek Peran

Biddle dan Thomas, dalam (Sarwono, 2015:32) membagi peran dalam empat golongan, yaitu:

a. Orang-orang yang mengambil peran

Orang-orang yang mengambil peran dapat dikategorikan dalam dua bagian. Pertama adalah aktor, yang sedang berperilaku melakukan suatu peran tertentu. Kedua target atau sasaran yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Dalam hal ini aktor maupun target atau sasaran dapat berbentuk individu atau kelompok.

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Wujud dari perilaku yang muncul dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari aktor satu ke aktor yang lain.

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.

d. Kaitan antara orang dan perilaku

Untuk menetapkan kaitan antara orang dan perilaku atau perilaku dengan perilaku, ditetapkan beberapa criteria yaitu: Kriteria kesamaan dan Derajat saling ketergantungan.

Sementara itu menurut Soekanto (2012:46) menjelaskan bahwa peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Setiap posisi dalam kelompok mempunyai peran yang saling berhubungan, yang terdiri dari perilaku yang diharapkan dari mereka yang menduduki posisi tersebut. Perilaku yang diharapkan umumnya sudah disetujui tidak hanya oleh mereka yang menduduki posisi tersebut, tetapi juga oleh anggota lain dalam kelompok itu. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungan.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut. (Soekanto, 2012:246).

Sebagai tambahan bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang maksud dan tujuan dari peran. Sebagai kesimpulan bahwa peran itu terukur melalui motivasi seseorang dan pengalaman serta kebutuhan. Orang sering memiliki peran yang kompleks secara kognitif namun seperti

kesan kepribadian, peran cenderung terorganisasi disekitar dimensi afektif dan cenderung sederhana.

3. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 44 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu instansi pemerintahan di daerah yang bergerak di bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang alam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur. Serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup kepemudaan dan olahraga dengan laporan secara berkala.

Berdasarkan definisi dan konsep peran, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan bahwa peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata khususnya Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 13

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga berubah nama menjadi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Hal ini dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki tugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah tanggung jawab Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Pitana (2005:76), mengemukakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam pariwisata sebagai berikut:

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Masyarakat, swasta, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Pemerintah. Pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. Dinamisator, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka

pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

4. Faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata

Dalam Pengembangan Wisata terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha atau produksi (Wibowo, 2016:98). Menurut Setianingsih (2019:39), suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Modal kepariwisataan itu mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata, sedang atraksi wisata itu sudah tentu perlu komplementer dengan motif perjalanan wisata.

1) Potensi Alam

Alam merupakan salah satu faktor pendorong seorang melakukan perjalanan wisata karena ada orang berwisata hanya

sekedar menikmati keindahan alam, ketenangan alam, serta ingin menikmati keaslian fisik flora dan faunanya. (Setianingsih, 2019:42).

Kecamatan Baraka memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Kekuatan wisata seperti obyek wisata alam, buatan maupun obyek wisata sejarah merupakan wisata andalan daerah Kecamatan Baraka.

2) Potensi Kebudayaan

Pengertian dari kebudayaan disini adalah kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian atau perkehidupan keraton dan sebagainya, akan tetapi juga adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Modal kebudayaan itu penting untuk menarik wisata agar dapat berkunjung dan menikmati kebudayaan tersebut. Sehingga diharapkan pengunjung bisa tertahan dan dapat menghabiskan waktu di tengah-tengah masyarakat dengan kebudayaannya yang dianggap menarik. (Wibowo, 2016:87).

3) Potensi Manusia

Manusia dapat dijadikan atraksi wisata yang berupa keunikan-keunikan adat istiadat maupun kehidupannya namun jangan sampai martabat dari manusia tersebut direndahkan sehingga kehilangan martabatnya sebagai manusia. (Lazarus,

2016:27).

Suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Menjadi atraksi wisata, sedang atraksi wisata itu sudah tentu harus komplementer dengan motif perjalanan wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan suatu daerah harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Baraka memiliki banyak obyek wisata, event budaya dan daerah yang relatif aman dan mudah untuk dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Serta partisipasi masyarakat yang baik terhadap kegiatan yang ada di Kecamatan Baraka.

b. Faktor penghambat

Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat pengembangan wisata. Hal ini tidak lepas dari adanya permasalahan yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisata yang ada di destinasi wisata. Belum tertata dengan baik berbagai macam potensi wisata maupun sarana dan prasarana objek wisata juga menjadi faktor penghambat pengembangan wisata. Dalam pengembangan

suatu daya tarik wisata tidak terlepas dari kondisi maupun pihak yang dapat menghambat keberlangsungan pengembangan pariwisata yang ada disuatu daerah maupun negara. Faktor penghambat adalah hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menggagalkan suatu kegiatan, usaha atau produksi. (Wibowo, 2016:76).

Dalam pelaksanaan program tidak terlepas dari kendala-kendala yang akan dihadapi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Demikian juga dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam menjalankan perannya dalam mengembangkan potensi obyek wisata selalu ada faktor penghambat yang terjadi.

1) Dana yang terbatas

Faktor yang mempengaruhi tidak dan lacarnya pembangunan pariwisata adalah keterbatasan dana. Sektor pariwisata merupakan sektor pilihan bukan sektor yang wajib didahului oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah juga mengupayakan secara maksimal dalam anggaran di bidang pariwisata karena pariwisata daerah merupakan aset yang dimiliki dan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Nurhadi dkk, 2013:33).

2) Lokasi geografis obyek wisata

Bagi obyek wisata seperti pegunungan sangat susah dijangkau. Jika ingin menambah fasilitas sarana dan prasarana yang lain. Dengan kondisi tersebut maka ditakutkan akan mahal biaya angkut, dan lain-lain menuju obyek wisata tersebut.

3) Status kepemilikan lahan dengan pihak lain

Salah satu penghambat pengembangan wisata pada suatu daerah adalah status kepemilikan lahan dengan pihak lain. Status kepemilikan hutan biasanya ada di pihak Pemerintah setempat karena biasanya masih sebagian besar dimiliki oleh Dinas Kehutanan. Jadi tidak bisa sembarangan membangun dan memperluas obyek wisata. (Puspita, 2019:54).

C. Tinjauan tentang Pengembangan Pariwisata

1. Pengertian Pengembangan

Pengertian pengembangan menurut J.S Badudu (1994:87), dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah cara atau hasil kerja mengembangkan, mengembangkan berarti membuka, memajukan, menjadikan jadi maju dan bertambah baik. Maka berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata adalah usaha atau cara memajukan bidang pariwisata.

Pengembangan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu menjadi lebih baik, maju, sempurna, dan berguna. Pengembangan merupakan suatu proses/aktivitas memajukan sesuatu yang dianggap perlu untuk ditata sedemikian rupa dengan meremajakan atau memelihara yang sudah berkembang agar menjadi lebih menarik dan berkembang. Menurut Gamal Suwanto menjelaskan bahwa “strategi pengembangan pariwisata bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahap” (Suwanto, 2007:55). Dalam melakukan sebuah pengembangan pariwisata daerah, peran serta pemerintah daerah sangat mutlak dibutuhkan Dengan tujuan, pengembangan pariwisata tersebut mengarah pada pembangunan daerah.

2. Pengertian Pariwisata

Menurut Rohimah (2019:43), pariwisata merupakan sebuah kegiatan oleh seseorang atau orang secara berkelompok yang memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan sebuah kegiatan perjalanan menikmati sebuah tempat dengan tujuan berekreasi atau mencari hiburan. Dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Pitana (2009: 58), mengungkapkan bahwa konsep pariwisata mengandung makna perjalanan yang dilakukan seseorang,

yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja.

Pengertian pariwisata menurut A.J Burkat dalam Damanik (2006:65), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.

Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana (2005:94), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti, (2006:70). Pariwisata berasal dari dua kata yaitu Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan Wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "*reave*" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata "pariwisata" dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ketempat yang lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*Tour*"

3. Tujuan dan Manfaat Pariwisata

Pariwisata merupakan sebuah kegiatan usaha dalam melayani kebutuhan atau memenuhi keinginan seorang wisatawan yang akan

memulai atau sedang dalam melakukan sebuah perjalanan wisata. Setelah kita mengetahui berbagai macam pengertian mengenai “Kepariwisata” dari berbagai macam sumber yang telah memudahkan kita semua dalam memahami apa itu kepariwisataan secara baik tanpa merasa ragu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu pengertian dari kepariwisataan masih ada tujuan serta manfaatnya sesuai dengan intruksi presiden nomor 9 tahun 1969 yang dikutip dari buku “perencanaan penegenbanagan pariwisata” oleh Oka A. Yoeti (2006:78) dikatakan bahwa tujuan dari pengembangan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara serta masyarakat pada umumnya. Memperluas kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.
- b. Memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- c. Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional

Selain itu manfaat yang didapat dari bidang kepariwisataan yang mencakup dalam berbagai bidang yaitu ekonomi budaya politik, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan peluang dan juga kesempatan kerja diantaranya adalah :

- a. Manfaat Kepariwisata dari segi ekonomi

Pariwisata bisa menghasilkan devisa bagi Negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara. (Yoeti, 2006:87).

b. Manfaat Kepariwisataaan dari segi Budaya

Membawa sebuah pemahaman dan pengertian anatar budaya deng acara lewat interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada. Sehingga dari segi interaksi inilah para wisatawan dapat menegenal dan juga menghargai budaya masyarakat setempat dan juga latar belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut. (Yoeti, 2006: 89).

c. Manfaat Kepariwisataaan dari segi Politik

Memelihara hubungan internasional dengan baik yaitu dalam pengembangan pariwisata dalam mancanegara. Sehingga terjadinya kunjungan antar bangsa sebagai wisatawan seperti halnya dalam pariwisata nusantara. Sehingga dapat memberikan inspirasi untuk selalu mengadakan pendekatan dan saling mengerti.

d. Manfaat Kepariwisataaan dari segi lingkungan hidup

Setiap tempat pariwisata apabila ingin dikunjungi oleh banyak wisatawan harus terjaga kebersihannya sehingga masyarakat secara bersama-sama harus sepakat untk merawat serta memelihara lingkungan atau daerah yang bisa dijadikan sebuah objek wisata

e. Manfaat Kepariwisataaan dari segi nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan

Memiliki teman dari berbagai macam Negara sehingga dapat mengetahui kebiasaan mereka sehingga bisa mempelajari kegiatan baik dari Negara mereka. Sedangkan dari segi ilmu pengetahuan kita bisa mempelajari pariwisata serta dapat mengetahui diman letak keunggulan dari sebuah objek wisata sehingga dapat menerapkan di daerah objek wisata daerah yang belum berkembang dengan baik.

f. Manfaat Kepariwisata dari segi peluang dan kesempatan kerja

Menciptakan berbagai macam kesempatan kerja, serta mendirikan berbagai macam usaha yang bisa mendukung objek pariwisata menjadi lebih baik dan juga menarik.

4. Sumber Daya Pariwisata

Tidak dapat dipungkiri bahwa berjalannya industri pariwisata sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia. Menurut Pitana, (2009:101) mengartikan sumber daya sebagai berikut:

“...resources are not, they become: they are not static but expand and contract in response to human wants and human actions Resources are attributes of the natural world that are no more than, neutral stuff until a combination of increased knowledge, expanding technology, and changing individual and societal objectives result in their presence being perceived, their capacity to satisfy human wants ”.

Sumber daya merupakan atribut alam yang bersifat netral sampai adacampur tangan manusia dari luar untuk mengubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Dalam konteks

pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Pitana, 2009:106).

Sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata disamping sumber daya manusia, umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya minat khusus.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir dalam setiap elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Singkatnya, faktor sumber daya manusia sangat menentukan eksistensi pariwisata. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata, Mc Intoshetal., dalam (Pitana dan Diarta, 2009) memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti dibidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman.

b. Sumber Daya Alam

Menurut Fennel (dalam Pitana, 2009:112), sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi geografis, menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variable lainnya.
- 2) Iklim dan cuaca, yang ditentukan oleh latitude dan elevation diukur dari permukaan air laut, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya.
- 3) Topografi dan landforms. Bentuk umum dari permukaan bumi (topografi) dan stuktur permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam yang unik (*landforms*). Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah/ benua dengan wilayah/ benua lainnya sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata,
- 4) *Surface materials*. Menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya yang sangat unik dan menarik sehingga bias dikembangkan menjadi atraksi wisata alam.
- 5) Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi *out door*, misalnya bias dikembangkan jenis wisata pantai/ bahari, danau, sungai dan sebagainya.
- 6) Vegetasi, merunjuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi suatu area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung

pada kehidupan formasi tumbuhan seperti ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan lindung.

- 7) Fauna, beragam jenis binatang berperan cukup signifikan terhadap aktivitas wisata seperti melihat cara binatang makan dan hidup. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam tergantung dari elemen sumber dayanya dan kegunaan yang dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan manusia seperti keajaiban dan keindahan alam, keragaman flora dan fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem yang belum terjamah manusia, rekreasi perairan, objek megalitikum, suhu serta curah hujan. Sehingga sumber daya alam dapat menjadi atraksi wisata alam.

c. Sumber daya budaya

Sumber daya budaya dapat menjadi wisata budaya, salah satunya dengan melihat dan mencoba kehidupan masyarakat suatu daerah mulai dari kebiasaan, adat istiadat hingga makanan tradisional.

d. Sumber daya minat khusus

Saat ini, pariwisata dengan minat khusus menjadi *trend* perkembangan pariwisata kedepan sebab calon wisatawan menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. Darsoprajitno, (dalam Brahmanto, 2017:64) Daya tarik wisata terdiri dari tata alam, masyarakat, dan hasil binaan. Dari ketiganya, ada beberapa unsur yang dapat

dikembangkan secara khusus, sehingga disebut daya tarik wisata minat khusus.

Pada prinsipnya, pariwisata minat khusus mempunyai kaitan dengan petualangan. Secara fisik dapat menguras tenaga wisatawan, serta ada unsure tantangan yang harus dilakukan, karena bentuk pariwisata ini banyak terdapat di daerah terpencil, seperti: kegiatan tracking, hiking, pendakian gunung, rafting disungai, dan lainnya, Fandeli, (dalam Brahmanto, 2017:69). Ada beberapa criteria menurut Fandeli (dalam Sudana, 2013:83), yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menetapkan suatu bentuk wisata minat khusus yakni:(1) *Learning*, pariwisata yang mendasar pada unsur belajar; (2) *Rewarding*, pariwisata yang memasukkan unsur pemberian penghargaan;(3) *Enriching*, pariwisata yang memasukkan peluang terjadinya pengkayaan pengetahuan antara wisatawan dengan masyarakat; (4) *Adventuring*, pariwisata yang dirancang dan dikemas sehingga terbentuk wisata petualangan.

5. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana dan prasarana pariwisata merupakan salah satu indikator perkembangan pariwisata. Sarana atau prasarana dapat diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari pengadaan dan juga peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan juga bisa terjangkau oleh wisatawan.

a. Sarana Kepariwisataaan

Sarana kepariwisataan (*tourism infrastructure*). Adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan juga berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan yang berkinjung ke tempat wisata dan juga memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam.

Sarana pariwisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. (Suwanto, 2007:58).

Pembangunan sarana wisata didalam daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisata baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana pariwisata secara kualitatif menunjukan pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukan pada mutu pelayanan yang telah diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun pada suatu standar wisata yang baku, baik itu secara nasional dan juga secara internasional, sehingga penyediaan sarana pariwisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan juga kualitas yang akan disediakan. Menurut Lothar A. Kreck (dalam Yoeti,2006:119) Sarana produk kepariwisataan yaitu semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan. Misalnya: di bidang usaha

jasa pariwisata, seperti: biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan intensif dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata dan di bidang usaha sarana pariwisata yang terdiri dari: akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata dan sebagainya.

b. Prasarana Kepariwisata

Prasarana (*infrastructures*) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian bisa berjalan dengan lancar aedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Prasarana pariwisata adalah sebuah sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang bisa mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Suwantoro (2007:98).

6. Kebijakan Pengembangan Pariwisata

a. Kebijakan Pokok

- 1) Mewadahi, membangun dan juga mengembangkan manfaat potensi pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan apatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi daripada sebagai fasilitator regulator yang bisa menjadi pengembangan pariwisata.

- 3) Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan seorang dalam mengembangkan kawasan wisata.
- 4) Mengantarakan kerjasama pariwisata antar daerah dan juga dunia usaha.

b. Kebijakan Spasial (keruangan) Pariwisata

- 1) Memberikan arahan yang jelas agar bisa menjadi pengembangan pariwisata berdasarkan Karakteristik keruanga melalui zonasi pengembangan.
- 2) Untuk kemudahan pembanguanan dan pengolahan yang perlu dilakukan adalah pengelompokan obyek daya tarik wisata pada Satuan Kawasan Wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisatawan agar mempunyai keterkaitan sirkuit atau jalur wisata.
- 3) Melakukan urutan proiritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampknya terhadap perkembangan obyek dan juga daya tarik wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pengembangan daerah pariwisata selalu aktif bergerak untuk mengetahui makna tujuan dan strategi untuk mencapai kondisi kepariwisataan yang dianggap lebih baik dan bernilai. Oleh karena itu, ditemukan paradigma, model dan strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan secara dinamik telah bergeser fokus dan

keberpihakannya serta beradaptasi sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang pada waktunya.

- 1) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata menyangkut aspek pemanfaatan dan penegndalian yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi oleh karenanya pembangunan obyek dan daya tarik wisata harus sesuai dengan dasar-dasar pada sistem perencanaan.
- 2) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan dasar pendekatan pembangunan Satuan Kawasan Wisata dengan nuansa nilai agama, budaya estetika dan moral yang dianut oleh masyarakat.
- 3) Penegmbangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar dan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata pantai dan juga wisata petualangan

d. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata

- 1) Menyiapkan sistem perencanaan Tata Ruang Kawasan Wisata.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata
- 3) Pemenuhan fasilitas standar (fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, komunikasi) di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Menarik investor untuk membangun akomodasi dan juga fasilitas penunjang lainnya.

D. Tinjauan tentang Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan dari desa wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah desa menjadidesa wisata. Berikut pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan desawisata. (Soemarno, 2010:71)

1. Pengertian Desa Wisata

Objek wisata pedesaan merupakan salah satu bagian dari pariwisata yang keberadaanya menjadi favorit dikalangan wisatawan saat ini. Nuryanty (dalam Soemarno, 2010:86) mengatakan Desa wisata merupakan suatu bentuk integritas antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara tradisi yang berlaku.

Chafid (dalam Susfenti, 2016:97) menjabarkan Desa wisata sebagai suatu wilayah yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik Desa wisata, misalnya atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya.

Terdapat dua konsep utama dalam komponen Desa wisata menurut Susfenti (2016:58), yaitu sebagai berikut:

- a. Akomodasi, yang merupakan sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- b. Atraksi, yaitu seluruh kehidupan.

Keseharian penduduk setempat beserta setting fisiklokasi yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif

2. Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Desa Wisata

- a. Interaksi tidak langsung

Model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi semisal: penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya.

- b. Interaksi setengah langsung

Bentuk-bentuk *oneday trip* yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ketempat akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk.

c. Interaksi Langsung

Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat setempat. Alternatif lain dari model ini adalah penggabungan dari model pertamadan kedua (UNDP and WTO. 1981).

Menurut Soemarno (2010:93), pada pendekatan Pasar untuk Pengembangan Desa Wisata diperlukan beberapa kriteria yaitu:

- a. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
- b. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
- c. Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
- d. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan system kemasyarakatan yang ada
- e. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, airbersih, drainase, telepon dan sebagainya.

2. Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata

Pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi.

- a. Mengonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan dari rumah tersebut. Contoh pendekatan dari tipe pengembangan model ini adalah Desa Wisata di Koanara, Flores. Desa wisata yang terletak di daerah wisata Gunung Kelimutu ini mempunyai asset wisata budaya berupa rumah-rumah tinggal yang memiliki arsitektur yang khas. Dalam rangka mengkonservasi dan mempertahankan rumah-rumah tersebut, penduduk desa menempuh cara memuseumkan rumah tinggal penduduk yang masih ditinggali. Untuk memwadahi kegiatan wisata di daerah tersebut dibangun juga sarana wisata untuk wisatawan yang akan mendaki Gunung Kelimutu dengan fasilitas berstandar resor minimum dan kegiatan budayalain.
- b. Mengonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa tersebut dan sekaligus mengembangkan lahan tersebut sebagai area pariwisata dengan fasilitas-fasilitas wisata. Contoh pendekatan pengembangan desa wisata jenis ini adalah Desa Wisata Sade, di Lombok.

- c. Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi didalam wilayah desa tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industry skala kecil. Contoh dari bentuk pengembangan ini adalah Desa wisata Wolotopo di Flores. Aset wisata di daerah ini sangat beragam antara lain : kerajinan tenun ikat, tarian adat, rumah-rumah tradisional dan pemandangan ke arah laut. Wisata di daerah ini dikembangkan dengan membangun sebuah perkampungan skala kecil di dalam lingkungan Desa Wolotopo yang menghadap ke laut dengan atraksi-atraksi budaya yang unik. Fasilitas-fasilitas wisata ini dikelola sendiri oleh penduduk desa setempat. Fasilitas wisata berupa akomodasi bagi wisatawan, restaurant, kolam renang, peragaan tenun ikat, plaza, kebun dan dermaga perahu boat.

3. Strategi Pembangunan Desa Wisata

Dalam proses pembangunan Desa wisata, memerlukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Untuk mencapai sebuah perencanaan yang sistematis, diperlukan adanya perencanaan yang strategis. Menurut Pitana (2009:109), beberapa tahapan perencanaan strategis dalam pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan terlebih dahulu bisnis/usaha apa yang akan dimasuki dalam pariwisata tersebut, biasanya didirikan oleh misiorganisasi yang tergantung pada jenis usaha apa yang dimasuki
- b. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama dari sebuah organisasi, seperti penguasaan pasar yang

melibatkan pengenalan produk baru. Tujuan organisasi ini harus mempunyai target kapan tujuan tersebut akan diwujudkan. Hal ini memberikan kerangka waktu, menetapkan tujuan jangka pendek, serta pencapaian dan tindakan yang diperlukan.

- c. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kualitas keputusan organisasi yang diambil sangat tergantung pada kualitas informasi yang dikumpulkan. Sumber informasi mungkin berasal dari pemerintah, industry atau sumber lainnya. Kemudian pengetahuan atau informasi diolah secara sistematis berdasarkan tujuan yang akan dicapai.
- d. Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari organisasi. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama, Informasi yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan masa kini, baik yang menyangkut organisasi itu sendiri maupun lingkungan diluar organisasi yang mempengaruhi kehidupan organisasi. Kedua, Informasi yang dapat membantu perencanaan memberikan perkiraan masa depan, misalnya dengan menggunakan analisis SWOT.
- e. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan
- f. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.
- g. Mendistribusikan sumber daya ke masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil.

- h. Mengimplementasikan rencana.
- i. Mengontrol dan memonitor hasil dan perbaikan jika diperlukan.

Sedangkan menurut Nuryanti (dalam Soemarno, 2010:109) dalam mengembangkan Desa wisata perlu adanya upaya-upaya yang ditempuh, diantaranya adalah:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia ini bisa dilakukan dengan cara pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar atau workshop. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan keterampilan lain untuk menambah kegiatan usaha lainnya.
- b. Kemitraan. Pola kemitraan atau kerjasama yang dilakukan antara pihak pengelola Desa wisata dengan para pengusaha pariwisata dikota atau pihak Pembina Desa wisata, hal ini bias dengan pihak Dinas Pariwisata daerah, antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dll agar saling menguntungkan.
- c. Kegiatan Pemerintah Desa. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pengembangan Desa wisata melalui acara seperti rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara upacara hari besar yang dilakukan di Desa wisata.
- d. Promosi. Desa wisata harus dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu peran dari pemerintah desa dan kabupaten/ daerah sangat dibutuhkan.
- e. Mengadakan festival/pertandingan. Kegiatan rutin di Desa wisata ini

perlu diselenggarakan agar mampu menarik minat wisatawan.

- f. Membina organisasi warga. Pembinaan ini dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengembangan dan memajukan Desawisata.
- g. Kerja sama dengan Universitas. Sebaiknya menjalin kerja sama dengan Universitas disekitar agar mampu memberikan masukan dan peluang bagi Desa wisata untuk meningkatkan pembangunan Desa wisata melalui program Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Praktik Lapangan.

4. Kebijakan Pembangunan Desa Wisata

Kebijakan merupakan sebagai arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh pemerintah. Post, etal (dalam Handoyo, 2012:65) memaknai kebijakan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang mempengaruhi kehidupan penduduk Negara secara substansial.

Adanya pembangunan pariwisata diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah. Dalam proses implementasinya, Pitana dan Diarta (2009) menjelaskan kebijakan pariwisata memerlukan beberapa tahapan, yaitu: 1) Mengevaluasi pasar; 2) Memilih lokasi yang cocok; 3) Mengidentifikasi pemain kunci (*stakeholder*); 3) Melakukan studi fisibilitas pasar dan keuangan; 4) Merencanakan dan membuat desain konsep; 5) Membuat dokumentasi proposal; 6) Mengkonsultasikan dengan masyarakat; 7) Mengikuti proses perijinan; 8) Melengkapi proses investasi; 9)

Mempersiapkan dokumentasi bangunan; 10) Fase konstruksi dan pembangunan; 11) Menyediakan rencana operasional.

Menurut United Nation-World Trade Organization (UN-WTO) (dalam Pitana, 2009:63) peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata harus memperhatikan beberapa hal strategis dan bertanggung jawab, yaitu:

- a. Membangun kerangka operasional dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam denyut pariwisata.
- b. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya.
- c. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan sarana dan prasarana.
- d. Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.
- e. Menerjemakan kebijakan pariwisata yang disusun ke dalam rencana kongkret.

5. Manfaat Pengembangan Desa Wisata

Pembangunan desa wisata mempunyai manfaat ganda di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Manfaat ganda dari pembangunan desa wisata. Wiendu 1993 (dalam Soemarno, 2010:119), adalah:

- a. Ekonomi: Meningkatkan perekonomian nasional, regional dan masyarakat lokal.
- b. Sosial: Membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat didesa
- c. Pendidikan: Memperluas wawasan dan cara berfikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan sehat.
- d. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK): Meningkatkan ilmu dan teknologi bidang kepariwisataan.
- e. Sosial budaya: Menggali dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang hamper punah untuk dilestarikan kembali.
- f. Lingkungan: Menggugah sadar lingkungan (*Darling*), yaitu menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan di masa akan datang.

Selain itu Pengembangan Desa Wisata adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah

maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

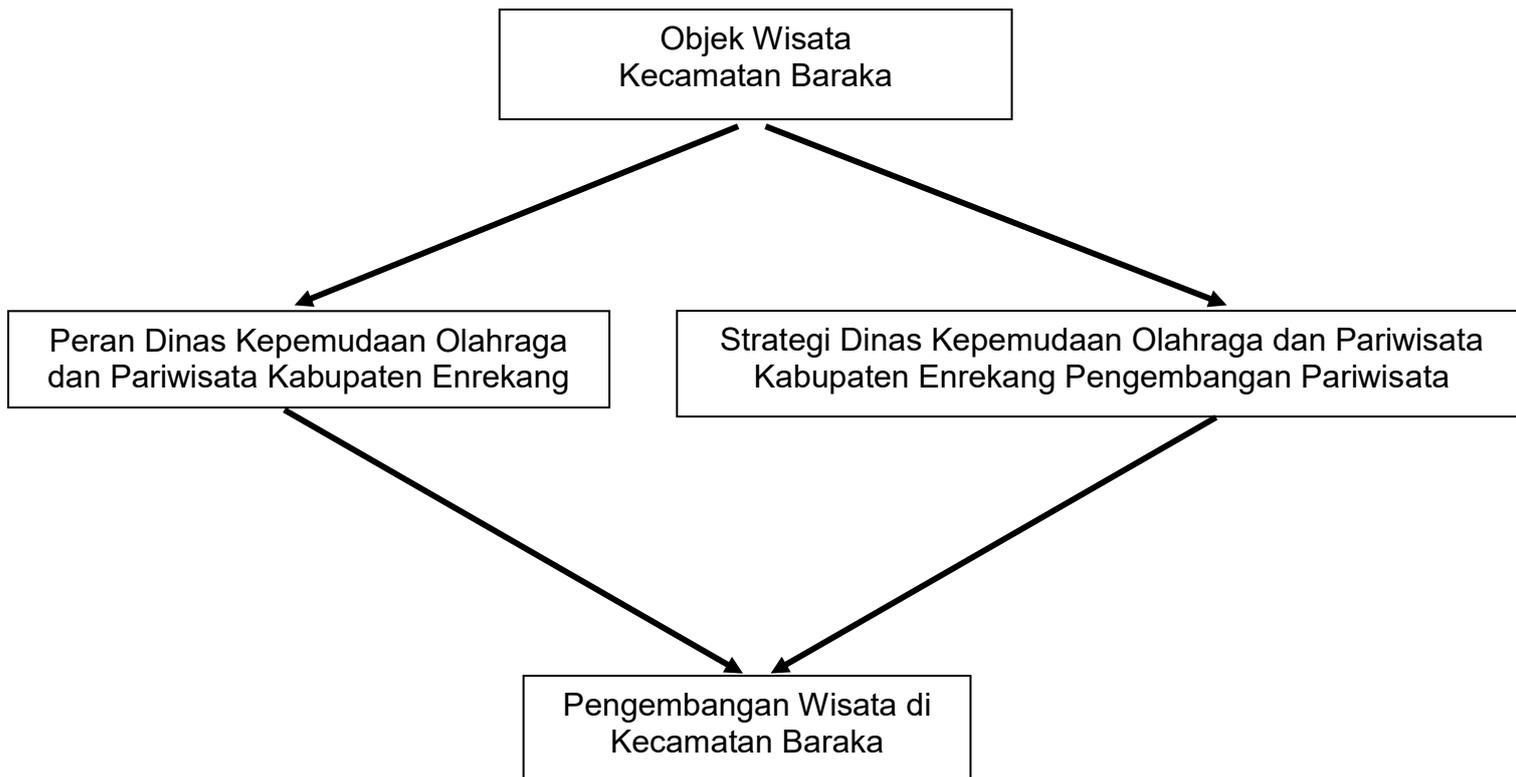
E. Kerangka Berpikir

Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dalam Pengembangan Wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pembangunan wisata berbasis *Community Based Tourism* membutuhkan proses yang panjang.

Penelitian mengenai peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang ini dilakukan dengan menggunakan teori strukturasi yang melihat hubungan dialektis antara agen dan struktur, yang mana dalam hal ini adalah adanya hubungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang melakukan suatu tindakan dalam pengembangan Wisata di Kecamatan Baraka akan menghasilkan bagaimana peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan wisata di Kecamatan Baraka.

Pemerintah kabupaten Enrekang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata diharapkan mampu berperan dalam menunjang program pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata diperlukan strategi atau langkah langkah yang komprehensif dan integral.

Sesuai dengan penjelasan diatas yang telah diajukan, maka peneliti harus membuat kerangka berpikir agar lebih terarah. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir